

Devriansyah. A, Purwanti. D, Mulyadi. A (2026). Optimalisasi Fungsi Lapang Merdeka Sebagai Public Sport Center Dalam Mewujudkan Kota Sehat. *Prediksi*. Vol. 25 (2) 1-15.

Optimalisasi Fungsi Lapang Merdeka Sebagai Public Sport Center Dalam Mewujudkan Kota Sehat

Akbar Devriansyah^{1*}, Dian Purwanti², Andi Mulyadi³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: ¹akbardevriansyah@ummi.ac.id, ²dianpurwanti42@ummi.ac.id, ³andimulyadi@ummi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

dd/mm/yyyy

Received in revised form:

dd/mm/yyyy

Accepted:

dd/mm/yyyy

Keyword:

Public sport center, Lapang merdeka, Healthy city

Kata Kunci:

Public sport center, Lapang merdeka, Kota sehat

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of Lapang Merdeka's function as a public sport center in Sukabumi City through the implementation of local government policies. The research was motivated by the deviation of the area's primary function due to commercial activities, inconsistencies in policy implementation, and the declining comfort of the community in utilizing Lapang Merdeka as a public sports facility. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using George C. Edward III's policy implementation model, consisting of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that policy implementation has been carried out relatively well through socialization programs, supervision, sports development activities, and inter-agency coordination. However, the optimization of Lapang Merdeka has not been fully achieved due to the persistence of non-sport activities, budget limitations, inadequate supervision, and the need for stronger institutional coordination. Therefore, enhancing supervision, strengthening coordination among government agencies, and increasing public awareness are essential to ensure the sustainable and optimal functioning of Lapang Merdeka as a public sport center.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai *public sport center* di Kota Sukabumi melalui implementasi kebijakan pemerintah daerah. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh terjadinya penyimpangan fungsi kawasan akibat aktivitas perdagangan, ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan, serta berkurangnya kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan olahraga, dan koordinasi antarinstansi. Namun, optimalisasi fungsi Lapang Merdeka belum sepenuhnya tercapai karena masih ditemukan aktivitas non-olahraga, keterbatasan anggaran, pengawasan yang belum optimal, serta koordinasi yang perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar fungsi Lapang Merdeka sebagai *public sport center* dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: akbardevriansyah@ummi.ac.id

PENDAHULUAN

Aktivitas olahraga merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup. Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan keolahragaan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran, dan kesejahteraan masyarakat (UU No. 11/2022, Pasal 4). Dalam konteks ini, ketersediaan fasilitas olahraga publik menjadi elemen strategis untuk mendorong aktivitas fisik warga serta pembentukan kota sehat (healthy city). Menurut World Health Organization, kota sehat adalah kota yang secara terus-menerus menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang mendukung kesehatan masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang aman dan ramah aktivitas fisik.

Kota Sukabumi merupakan salah satu daerah yang memiliki antusiasme masyarakat terhadap kegiatan olahraga. Lapang Merdeka sebagai ruang publik utama sekaligus ikon kota berperan penting sebagai pusat aktivitas fisik warga, area ini memiliki fasilitas olahraga seperti GOR merdeka, tartan track, lapangan basket, voli, jogging track, dan area rekreasi aktif lainnya yang idealnya mendukung pelayanan publik di bidang olahraga. Fungsi ini diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang publik untuk olahraga, kegiatan upacara, pendidikan, dan kegiatan pemerintah tertentu. Namun, peraturan tersebut tidak mencantumkan aktivitas perdagangan, bazar, maupun kegiatan ekonomi lainnya sebagai bagian dari fungsi yang diperbolehkan.

Upaya optimalisasi pengelolaan ruang publik olahraga juga sejalan dengan arah pembangunan daerah Kota Sukabumi. Dalam visi pembangunan Kota Sukabumi yaitu "Terwujudnya Sukabumi sebagai kota yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan inovasi", pemerintah daerah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu misi pembangunan Kota Sukabumi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, pengelolaan ruang publik seperti Lapang Merdeka menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya kondisi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga mengalami pergeseran. Sejumlah pemberitaan lokal menunjukkan bahwa area tersebut semakin dipenuhi aktivitas non-olahraga seperti perdagangan, wisata kuliner, dan bazar yang menempati area pedestrian maupun ruang terbuka di sekitar lapangan. Kondisi ini diberitakan oleh SukabumiUpdate dan SukabumiToday yang menyoroti semakin maraknya aktivitas ekonomi di sekitar Lapang Merdeka sehingga mengurangi kenyamanan warga yang ingin berolahraga. Pergeseran fungsi ruang publik ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan ruang olahraga yang aman dan nyaman.



Gambar 1.1 keluhan masyarakat dan kegiatan non-olahraga yang tidak sesuai fungsi

Selain berbagai pemberitaan di media massa, keluhan masyarakat mengenai menurunnya fungsi olahraga di Lapang Merdeka juga terlihat dari respons publik di media sosial. Pada Januari 2025, akun Instagram SukabumiToday mengunggah pesan dari warga yang menyampaikan komplain mengenai kondisi tartan track Lapang Merdeka yang kini didominasi penyewaan sepeda dan sepeda listrik. Dalam unggahan tersebut, warga mengeluhkan bahwa jalur lari yang seharusnya digunakan untuk aktivitas olahraga justru dipadati kendaraan sewa sehingga mengganggu pelari dan atlet komunitas. Warga juga menyayangkan tidak adanya pemeliharaan dan pengawasan yang memadai terhadap track lari yang rusak akibat aktivitas non-olahraga, padahal fasilitas tersebut dibangun menggunakan anggaran yang besar dan memiliki fungsi penting bagi masyarakat pecinta olahraga. Keluhan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik dan menguatkan indikasi terjadinya penyimpangan fungsi ruang publik. Temuan ini memperlihatkan bahwa pergeseran fungsi Lapang Merdeka bukan hanya bersifat kebetulan, tetapi telah menjadi fenomena yang tampak secara kasat mata dan dirasakan langsung oleh pengguna fasilitas.



Gambar 1.2 Warga mengeluhkan fungsi tartan track Lapang Merdeka yang dipadati sepeda listrik
Sumber : Sukabumitoday

Perubahan pola pemanfaatan Lapang Merdeka ini memperlihatkan bahwa ruang publik olahraga menghadapi tekanan yang cukup besar dari kepentingan ekonomi dan rekreasi komersial. Keluhan masyarakat yang muncul di media sosial serta pemberitaan lokal menunjukkan bahwa gangguan terhadap aktivitas olahraga bukanlah kasus insidental, tetapi telah menjadi fenomena rutin yang mengurangi fungsi dasar ruang publik tersebut. Situasi ini menandakan adanya persoalan mendasar terkait pengawasan, pengaturan pemanfaatan ruang, dan kurangnya tata kelola yang efektif terhadap fasilitas olahraga yang sudah tersedia. Padahal, dalam konteks pelayanan publik, ruang olahraga merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah perkotaan yang ruang terbukanya semakin terbatas. Kondisi ini menjadikan optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai pusat olahraga publik semakin penting, tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan pelayanan publik yang mendukung kesehatan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas fisik saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang konsisten, serta regulasi pemanfaatan ruang publik yang jelas dan dijalankan secara efektif.

Permasalahan tersebut semakin terlihat ketika ditinjau dari kebijakan yang berlaku. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 menetapkan bahwa Lapang Merdeka diperuntukkan bagi kegiatan upacara, olahraga, pendidikan, pariwisata, dan kegiatan pemerintah. Namun dalam regulasi tersebut tidak tercantum penggunaan ruang untuk aktivitas

perdagangan atau kegiatan ekonomi lainnya. Ketidakhadiran pengaturan mengenai batasan kegiatan non-olahraga di dalam Perwal tersebut membuka celah kebijakan (policy gap) yang menyebabkan munculnya penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak berjalan optimal sehingga terjadi ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan realitas pemanfaatan ruang publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diiringi dengan implementasi dan pengawasan yang efektif di tingkat lapangan. Apabila permasalahan penyimpangan fungsi Lapang Merdeka tidak segera dicari solusinya, maka kota akan menghadapi implikasi yang merugikan dari sisi pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Ruang olahraga yang semakin tergerus akan membuat masyarakat kehilangan akses terhadap fasilitas olahraga yang layak, sehingga menurunkan tingkat aktivitas fisik, Kerusakan fasilitas akibat penggunaan yang tidak sesuai juga akan meningkatkan beban biaya perbaikan bagi pemerintah daerah.

Lapang Merdeka sebagai salah satu ruang publik di Kota Sukabumi pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat. Dalam perspektif administrasi publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan mengelola fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, termasuk fasilitas olahraga dan ruang terbuka publik. Keberadaan Lapang Merdeka tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi dan olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari pelayanan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, aktivitas sosial, serta ruang interaksi publik. Sebagai fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi, Lapang Merdeka seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi utamanya sebagai ruang olahraga masyarakat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya penyimpangan fungsi ruang, sehingga tujuan penyediaan fasilitas publik tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas urusan keolahragaan sebagaimana diatur dalam Perwal No.146 tahun 2022 bertanggung jawab untuk memastikan fasilitas olahraga publik berfungsi optimal. Namun, maraknya aktivitas olahraga di Lapang Merdeka menunjukkan bahwa peran Disporapar dalam pengelolaan dan optimalisasi belum sepenuhnya efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam tata kelola fasilitas olahraga publik serta perlunya strategi optimalisasi yang lebih efektif agar Lapang Merdeka dapat kembali berfungsi sebagai pusat olahraga masyarakat dan mendukung terwujudnya kota sehat. Peran Disporapar menjadi semakin krusial ketika mempertimbangkan bahwa fasilitas olahraga merupakan bagian dari pelayanan publik yang bersifat dasar dan wajib. Masyarakat kota memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap ruang olahraga yang aman, layak, dan bebas dari gangguan. Ketika fungsi Lapang Merdeka terganggu oleh aktivitas non-olahraga, berarti terjadi penurunan kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Kondisi ini menempatkan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) pada posisi yang sangat strategis untuk menentukan arah pengelolaan fasilitas olahraga melalui berbagai upaya optimalisasi.

Permasalahan yang terjadi pada Lapang Merdeka tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik fasilitas atau perilaku masyarakat semata, melainkan lebih berkaitan dengan aspek tata kelola ruang publik oleh pemerintah daerah. Tata kelola yang dimaksud meliputi bagaimana kebijakan pengelolaan ruang publik tersebut diimplementasikan, bagaimana koordinasi antar pihak yang terlibat, serta bagaimana pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan dalam mengelola Lapang Merdeka sebagai ruang publik olahraga melalui

implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi.

Ketidaksesuaian antara fungsi yang diharapkan melalui kebijakan dengan kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi kebijakan dan pengelolaan ruang publik. Situasi ini juga menghambat pencapaian tujuan kota sehat, mengingat ruang aktivitas fisik masyarakat menjadi terbatas dan kurang optimal. Apabila permasalahan ini dibiarkan tanpa adanya kajian dan rekomendasi berbasis penelitian, maka fungsi Lapang Merdeka sebagai fasilitas olahraga publik akan semakin tergerus. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik, serta memperlemah kualitas pelayanan publik di bidang olahraga. Dengan melihat berbagai fenomena dan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana upaya Disporapar Kota Sukabumi dalam mengoptimalkan fungsi Lapang Merdeka sebagai pusat olahraga publik dan bagaimana upaya tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kota sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pengumpulan data yang bersifat naturalistik, pengajuan pertanyaan terbuka, serta analisis data secara induktif untuk menemukan pola, tema, dan makna dari data yang diperoleh. Proses tersebut dilakukan secara fleksibel agar peneliti dapat menangkap kompleksitas realitas sosial yang diteliti secara utuh.

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana kebijakan publik diimplementasikan oleh aktor pelaksana, serta bagaimana kebijakan tersebut dipahami dan dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pendekatan ini relevan untuk penelitian kebijakan publik yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, dinamika, dan konteks implementasi kebijakan di lapangan.

Pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2018:6-8) bahwa penelitian kualitatif deskriptif yaitu:

"Penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau acara kuantifikasinya lainnya. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode alamiah. Sedangkan untuk pendekatan deskriptif merupakan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti".

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025, termasuk peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi, serta realitas pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai public sport center oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan tidak hanya terbatas pada pernyataan informan, tetapi juga mencakup hasil

observasi dan dokumentasi yang mendukung pemahaman terhadap kondisi lapangan secara menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, gambar, serta informasi kontekstual lainnya yang diperoleh dari lapangan. Seluruh data yang dikumpulkan memiliki peran penting dalam memahami secara utuh fenomena yang diteliti, khususnya terkait proses implementasi kebijakan dan dinamika pemanfaatan ruang publik olahraga. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta menggali fakta dan informasi secara mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam upaya optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Sukabumi dalam mendukung terwujudnya kota sehat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Lapang Merdeka Sebagai Public Sport Center di Kota Sukabumi

Optimalisasi fungsi lapang merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi tidak terlepas dari bagaimana implementasi kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keempat dimensi tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik di Kota Sukabumi. Analisis dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh peneliti selama penelitian berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti aktivitas non-olahraga di kawasan Lapang Merdeka, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya pengawasan dan penertiban kawasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan, peneliti menganalisis hasil penelitian berdasarkan dimensi implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai berikut.

1. Dimensi Komunikasi

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi berperan dalam menyampaikan tujuan, aturan, dan informasi kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif. Dalam dimensi komunikasi terdapat tiga indikator, yaitu transmisi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Pada penelitian ini, dimensi komunikasi digunakan untuk melihat bagaimana penyampaian informasi, sosialisasi, koordinasi, serta penerapan aturan terkait pemanfaatan Lapang Merdeka.

a. Indikator Transmisi (Transmission)

Transmisi (transmission) berkaitan dengan bagaimana informasi dan kebijakan disampaikan kepada pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, transmisi komunikasi berkaitan dengan penyampaian aturan,

himbauan, serta koordinasi terkait pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik di Kota Sukabumi.



Gambar 4.6 himbauan dan penertiban kawasan lapang merdeka
Sumber: sukabumicity.com

Gambar diatas menunjukan petugas melaksanakan tugas imbauan dan penertiban di kawasan Lapang Merdeka. Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan penggunaan fasilitas publik agar sesuai fungsinya, sekaligus memastikan kenyamanan pengguna Lapang Merdeka.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa proses transmisi komunikasi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan Lapang Merdeka telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui sosialisasi, himbauan, dan pengawasan langsung kepada masyarakat. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi utama Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik.

b. Indikator Kejelasan (Clarity)

Kejelasan (clarity) berkaitan dengan sejauh mana informasi dan aturan kebijakan dapat dipahami oleh masyarakat maupun pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, kejelasan komunikasi dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik serta pemahaman terhadap aturan pemanfaatan kawasan tersebut.



Gambar 4.7 aktivitas masyarakat menggunakan fasilitas olahraga di Lapang Merdeka
Sumber: Peneliti 2026

Gambar diatas menunjukkan suasana aktivitas masyarakat yang sedang memanfaatkan fasilitas olahraga di Lapang Merdeka. Terlihat berbagai kalangan usia mengisi waktu dengan berolahraga ringan dan berjalan santai di area terbuka yang luas. Mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dengan memanfaatkan ruang publik yang tersedia.

Namun demikian, masyarakat menilai bahwa implementasi aturan di lapangan masih belum berjalan secara jelas dan optimal karena masih banyak aktivitas non-olahraga yang menggunakan kawasan tersebut.

c. Indikator Konsistensi (Consistency)

Konsistensi (consistency) berkaitan dengan bagaimana penerapan kebijakan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, konsistensi komunikasi dilihat dari bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik.



Gambar 4.9 Aktivitas penertiban kawasan Lapang Merdeka
Sumber: sukabumicitycom

Gambar diatas menunjukkan aktivitas penertiban di kawasan Lapang Merdeka yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki lima. Tindakan tegas ini merupakan langkah terakhir yang diambil setelah upaya persuasif, seperti pemberian edukasi dan imbauan secara langsung, tidak diindahkan oleh para pedagang. Penertiban dilakukan secara kolektif untuk memastikan ketertiban umum kembali terjaga, khususnya bagi para pedagang yang kedapatan masih tetap berjualan meskipun telah menerima teguran atas pelanggaran yang dilakukan berulang kali.

2. Dimensi Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan agar dapat berjalan secara optimal. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan mengalami hambatan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik. Dalam penelitian ini, dimensi sumber daya digunakan untuk melihat bagaimana ketersediaan sumber daya dalam mendukung optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan ketersediaan personel atau petugas yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan Lapang Merdeka. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia meliputi petugas pengawasan kawasan, petugas kebersihan, serta instansi yang terlibat dalam pengelolaan Lapang Merdeka.



Gambar 4.11 petugas kebersihan kawasan Lapang Merdeka
Sumber: Radarsukabumi

Gambar diatas memperlihatkan aktivitas salah satu petugas dari unit Ranger Satgas Kebersihan yang sedang menjalankan tugasnya di kawasan Lapang Merdeka. Keberadaan petugas ini merupakan langkah nyata dalam menjaga kebersihan fasilitas publik, mengingat tingginya aktivitas masyarakat di area tersebut yang sering kali memicu tumpukan sampah. Dengan dedikasi menjaga kebersihan secara rutin, para petugas memastikan Lapang Merdeka tetap nyaman, rapi, dan layak digunakan oleh seluruh warga yang berkunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa sumber daya manusia dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebenarnya telah tersedia melalui keberadaan Ranger, Satgas Kebersihan, dan keterlibatan instansi terkait. Akan tetapi, pengawasan kawasan masih belum optimal sehingga pemerintah daerah berencana menambah petugas keamanan untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga ketertiban kawasan Lapang Merdeka.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial berkaitan dengan ketersediaan anggaran yang digunakan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas olahraga di Lapang Merdeka. Ketersediaan anggaran menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik.



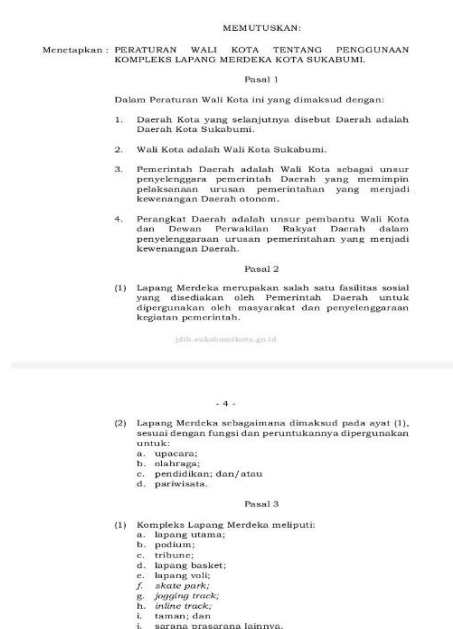
Gambar 4.12 kondisi fasilitas olahraga Lapang Merdeka

Gambar diatas memperlihatkan kondisi fasilitas olahraga di kawasan Lapang Merdeka. Dalam foto tersebut, terlihat area ruang terbuka publik yang ramai dikunjungi

oleh masyarakat untuk beraktivitas. Berdasarkan keterangan dari informan, pemerintah setempat berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya guna menjaga kualitas dan kenyamanan fasilitas tersebut. Hal ini sangat penting mengingat kedudukan Lapang Merdeka sebagai salah satu pusat kegiatan olahraga dan rekreasi utama bagi warga sekitar.

c. Sumber Daya Informasi

Sumber daya informasi berkaitan dengan ketersediaan informasi, aturan, serta petunjuk pelaksanaan kebijakan yang digunakan dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Dalam penelitian ini, sumber daya informasi dilihat dari bagaimana pemerintah daerah memberikan informasi terkait aturan penggunaan kawasan Lapang Merdeka kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 3 dari DPUTR Kota Sukabumi, diketahui bahwa pemerintah daerah telah memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait aturan penggunaan Lapang Merdeka melalui sosialisasi langsung dan himbauan tertulis.



Gambar 4.13 Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 tentang penggunaan kompleks Lapang Merdeka
Sumber: jdih.sukabumi.go.id

Gambar diatas menyajikan salinan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur tentang penggunaan kompleks Lapang Merdeka. Peraturan ini menjadi instrumen hukum utama yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai landasan dalam melaksanakan pengelolaan dan penertiban di kawasan tersebut. Berdasarkan dokumen yang bersumber dari laman resmi jdih.sukabumikota.go.id ini, kompleks Lapang Merdeka ditata sedemikian rupa agar fungsinya sebagai ruang publik dapat terjaga dengan tertib dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Sukabumi.

3. Dimensi Disposisi

Menurut George C. Edward III, disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Disposisi berkaitan dengan bagaimana pelaksana kebijakan memiliki kemauan, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini, dimensi disposisi digunakan untuk melihat bagaimana komitmen, kesungguhan, dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan mengoptimalkan fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. Pada dimensi disposisi terdapat dua indikator, yaitu sikap pelaksana dan insentif.

a. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen dan kesungguhan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini, sikap pelaksana dilihat dari bagaimana pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik serta bagaimana respon pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi di kawasan tersebut.



Gambar 4.14 kegiatan senam bersama di Lapang Merdeka
Sumber: Peneliti 2026

Gambar diatas mendokumentasikan kegiatan senam bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi di kawasan Lapang Merdeka. Meskipun di tengah keterbatasan, program pembinaan olahraga ini tetap berjalan secara rutin setiap hari Minggu sebagai upaya menjaga kebugaran masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi dan kerja sama antara Disporapar dengan berbagai pihak terkait dalam menghidupkan kembali semangat berolahraga di ruang publik yang menjadi ikon Kota Sukabumi tersebut.

b. Insentif

Insentif berkaitan dengan bentuk dukungan dan dorongan yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat berjalan secara optimal. Dalam penelitian ini, indikator insentif dilihat dari bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap petugas kebersihan, petugas pengawasan kawasan, serta upaya peningkatan pengamanan Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. Bentuk dukungan tersebut terlihat dari adanya pembentukan petugas Ranger Satgas Kebersihan yang bertugas

membantu menjaga kebersihan, ketertiban, serta pengawasan kawasan Lapang Merdeka. Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menambah petugas keamanan atau security guna memperkuat pengamanan kawasan agar aktivitas masyarakat di Lapang Merdeka dapat berjalan lebih tertib dan nyaman. Upaya tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap keberlangsungan fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik di Kota Sukabumi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, keberadaan petugas kebersihan dan petugas pengawasan kawasan cukup membantu menjaga kondisi Lapang Merdeka tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat untuk berolahraga. Akan tetapi, pada waktu tertentu seperti akhir pekan masih ditemukan aktivitas non-olahraga yang menggunakan area olahraga sehingga pengawasan kawasan masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, peneliti menginterpretasikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan bentuk dukungan dalam pengelolaan Lapang Merdeka melalui penguatan petugas lapangan, pemeliharaan kawasan, serta rencana penambahan pengamanan kawasan. Meskipun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center dapat berjalan lebih maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antar instansi, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan dalam menjalankan suatu kebijakan. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena adanya kejelasan kewenangan, koordinasi, dan prosedur kerja yang terstruktur.

Dalam penelitian ini, dimensi struktur birokrasi digunakan untuk melihat bagaimana pembagian kewenangan, koordinasi antar instansi, serta pelaksanaan aturan dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi. Pada dimensi struktur birokrasi terdapat dua indikator, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

a. Standard Operating Procedure (SOP)

Standard Operating Procedure (SOP) berkaitan dengan aturan, prosedur, dan mekanisme kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, SOP dilihat dari bagaimana aturan pemanfaatan Lapang Merdeka diterapkan dalam pengelolaan kawasan sebagai ruang olahraga publik.



Gambar 4.15 Dokumen Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi

b. Fragmentasi

Fragmentasi berkaitan dengan pembagian kewenangan dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, fragmentasi dilihat dari bagaimana pembagian peran antara DPUTR, Disporapar, dan instansi terkait dalam pengelolaan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, peneliti menginterpretasikan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan Lapang Merdeka telah memiliki pembagian kewenangan yang cukup jelas antara DPUTR, Disporapar, dan instansi terkait lainnya. Akan tetapi, koordinasi dan pengawasan antar instansi masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Fungsi Lapang Merdeka sebagai Public Sport Center di Kota Sukabumi yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, diperoleh berbagai temuan yang menunjukkan kondisi implementasi kebijakan pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Kesimpulan penelitian ini disusun berdasarkan empat dimensi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi komunikasi dalam optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi telah berjalan cukup baik. Pemerintah daerah melalui DPUTR dan instansi terkait telah melakukan sosialisasi, himbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan pemanfaatan Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan masyarakat dan pedagang yang menggunakan kawasan tidak sesuai dengan fungsi utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi penyampaian informasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

2. Dimensi Sumber Daya

Pada hasil penelitian, dimensi sumber daya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki sumber daya yang mendukung pengelolaan Lapang Merdeka, baik dari aspek sumber daya manusia, sumber daya informasi, maupun sarana dan prasarana olahraga. Keberadaan Ranger, Satgas Kebersihan, serta rencana penambahan petugas keamanan menunjukkan adanya dukungan sumber daya manusia dalam pengelolaan kawasan. Akan tetapi, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas olahraga sehingga optimalisasi fungsi Lapang Merdeka belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Dimensi Disposisi

Dalam hasil penelitian, dimensi disposisi menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan kesungguhan dalam menjaga fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Hal tersebut terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pengawasan kawasan, penertiban aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemeliharaan fasilitas, serta rencana penguatan pengamanan kawasan. Meskipun demikian, masih ditemukannya aktivitas non-olahraga di area

olahraga menunjukkan bahwa komitmen tersebut perlu didukung oleh pengawasan yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

4. Struktur Birokrasi

Pada hasil penelitian, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam pengelolaan Lapang Merdeka telah berjalan cukup jelas. DPUTR berperan sebagai instansi yang dominan dalam pengelolaan kawasan dan sarana prasarana Lapang Merdeka, sedangkan Disporapar berperan dalam kegiatan dan pembinaan olahraga. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan kawasan juga didukung oleh koordinasi dengan Satpol PP, Ranger, dan Satgas Kebersihan. Akan tetapi, koordinasi dan kolaborasi antar instansi masih perlu diperkuat agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi fungsi Lapang Merdeka sebagai public sport center di Kota Sukabumi telah dilaksanakan melalui berbagai upaya pemerintah daerah, baik melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, maupun struktur birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pemanfaatan kawasan yang belum sesuai dengan fungsi utama Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang olahraga publik dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2015). Public Policy-Making: An Introduction (8th ed.). Routledge.
- BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI (2022).
- BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI Sekretariat Daerah Kota Sukabumi (2025).
- Creswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Pustaka Pelajar.
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.). Routledge.
- Fadli Maulana, M., Septiadi, F., Nugraheni, W., Kesehatan, P. J., Rekreasi, D., Keguruan, F., Pendidikan, I., & Sukabumi, U. M. (2025). Indonesian Journal of Physical Activity MINAT MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI AKTIVITAS FISIK DI LAPANG MERDEKA SUKABUMI COMMUNITY INTEREST IN PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES AT THE MERDEKA SUKABUMI FIELD. <https://ijophya.org/index.php/ijophya>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). Bumi Aksara. Bumi Aksara Online
- Hughes, O. E. (2012). Public Managemenet and Administration An Introduction (4th ed.). Palgrave Macmilan.
- Indiahono, D. (2009a). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Gava Media.
- Indiahono, D. (2009b). Perbandingan Administrasi Publik. Gava Media.

- Kementerian Kesehatan RI. (2019). Pedoman Penyelenggara Kabupaten/Kota Sehat. kesmas.kemkes.go.id
- Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik: Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Rosdakarya.
- Najarudin, H. (2024). Ini Dia 9 Fasilitas Olahraga yang Ada di Lapangan Merdeka Sukabumi yang Wajib Dicoba. <https://www.kompasiana.com/amp/najarudin/664b33271470931d2f3f8of2/in-i-dia-9-semilan-fasilitas-olahraga-yang-ada-di-lapangan-merdeka-sukabumi-yang-wajib-dicoba>
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2-2029, sekretariat daerah kota sukabumi (2025).
- Ramadhan, I. ., & Yohhandi, A. (2022). KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PUBLIK SUKABUMI CITY GOVERNMENT POLICY REGARDING THE PROVISION OF PUBLIC SPORTS FACILITIES AND INFRASTRUCTURE. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/japes>
- revida, erika, hidayatulloh, a, simamarta, hengki, mangiring parulian, silalahi, marto, nurjaya, muhammad, & purba, sukarman. (2021). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. yayasan kita menulis.
- Siagian, S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed.). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–448. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- World Health Organization. (2024). What is a Healthy City? WHO Regional Office for Europe. <https://www.who.int/europe/groups/who-european-healthy-cities-network/what-is-a-health-city>
- Yaran, A., Sondakh, J. A., & Rompas, L. (2018). MANADO SPORT CENTER (HIGHTECH ARCHITECTURE).
- Yohhandi, A. (2021). Kebijakan pemerintah tentang penyediaan sarana dan prasarana olahraga publik di Kota Sukabumi (Studi evaluasi tentang ketersediaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana dan prasarana olahraga). <http://repository.upi.edu/63696/>
- Zaki, A. (2024). Visi Misi Wali Kota Sukabumi 2025-2030. Ayepzaki.Com. <https://ayepzaki.com/articles/visi-misi-wali-kota-sukabumi-2025-2030>